

**PENGARUH PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PEMAHAMAN REGULASI
TERHADAP KETERLAMBATAN PENYERAPAN ANGGARAN
PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KOMITMEN
ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Riau)**

Muhammad Safera Utama¹⁾, Yesi Mutia Basri²⁾, Sem Paulus²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : muhammadutamaa@gmail.com

*THE INFLUENCE OF BUDGET IMPLEMENTATION AND UNDERSTANDING OF
REGULATIONS ON DELAYS IN REGIONAL GOVERNMENT
BUDGET ABSORPTION WITH ORGANIZATIONAL
COMMITMENT AS A MODERATION VARIABLE
(Empirical Study on Regional Government Organizations in Riau Province)*

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of budget implementation and understanding of regulations on delays in regional government budget absorption with organizational commitment as a moderating variable. The research method used is a quantitative research method. The population in this research are institutions located in Riau Province. The sample in this study was 150. Data analysis was carried out using classic assumption tests and hypothesis testing using multiple regression methods and moderated regression methods. Based on the research results, it shows that budget implementation and understanding regulations influence budget absorption in Riau Province. Meanwhile, budget implementation and understanding of regulations, which are assisted by the moderating variable organizational commitment, have no influence on budget absorption

Keywords: *Budget Implementation, Understanding Regulations, Delays in Regional Government Budget Absorption and Organizational Commitment*

PENDAHULUAN

Setiap organisasi baik perusahaan maupun instansi atau lembaga sektor publik dalam menjalankan kegiatannya membutuhkan perencanaan. Perencanaan akan tercermin dari anggaran yang telah dirancang suatu organisasi, baik organisasi swasta atau sektor publik. Pada saat ini di Indonesia mengalami salah satu masalah yaitu keterlambatan penyerapan anggaran pada pemerintah. Penyerapan anggaran di awal tahun (triwulan pertama) begitu kecil sehingga mengalami peningkatan yang signifikan di akhir tahun (triwulan keempat). Hal ini memiliki dampak terhadap realisasi pelaksanaan program pada kegiatan pemerintah. Dampak

keterlambatan dapat menyebabkan keterlambatan akan manfaat yang diterima dan dinikmati masyarakat sehingga kualitas barang dan jasa yang disediakan dalam waktu yang terbatas (Malahayati, Islahuddin dan Basri, 2017)

Setiap tahun pemerintah menghimpun dan membelanjakan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Daerah) atau APBN (APBD). Istilah APBN yang dipakai di Indonesia secara formal mengacu pada anggaran pendapatan dan belanja yang dikelola pemerintah pusat. Proses penyusunan anggaran negara merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan banyak pihak termasuk semua departemen dan

Lembaga (atau dinas, kantor, dan badan), dan Lembaga legislative (DPR/DPRD) (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2017). Pada saat ini ekonomi Indonesia sangat pesat, maka dari itu menuntut adanya kemampuan manajerial untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien, hal ini banyak terjadi di daerah Indonesia. (Tirto.id, 2018).

Lambatnya penyerapan anggaran yang terjadi di Indonesia menjadi masalah setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada lambatnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam memaksimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat terpenuhi jika dilakukan secara efektif dan efisien (<https://djpb.kemenkeu.go.id>).

Penelitian ini meneliti penyerapan anggaran pada Provinsi Riau karena ditemukan fenomena mengenai penyerapan anggaran yang mana pada tahun 2020 belanja pegawai hanya mencapai 76,45% dari target 97%, belanja barang hanya mencapai 63,73% dari target 91%, belanja modal hanya mencapai 62,26% dari target 93% dan belanja bantuan sosial hanya mencapai 40,00% dari target 98%. Kemudian ditahun 2020 belanja pegawai hanya mencapai 75,44% dari target 95%, belanja barang hanya mencapai 64,89% dari target 95%, belanja modal hanya mencapai 43,55% dari target 95% dan belanja bantuan sosial hanya mencapai 58,44% dari target 95%.

Realisasi pendapatan di Provinsi Riau sampai dengan triwulan III 2020 mencapai Rp9,60 Triliun, turun 6,84% dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula dengan realisasi belanja negara mengalami penurunan 3,14% menjadi Rp26,47 triliun. Penurunan pendapatan negara hingga akhir triwulan III ini terutama disebabkan oleh kontraksi penerimaan perpajakan pada hampir seluruh jenis pajak akibat perlambatan kegiatan ekonomi. Kemudian, hingga awal Juni 2021 masih tergolong rendah, hanya mencapai 19% untuk

keuangan dan 26% untuk fisik dari total anggaran senilai Rp.7,908.triliun.

Secara teoritis, ada berbagai faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu pelaksanaan anggaran, Pemahaman regulasi, dan Komitmen organisasi. Namun hasil penelitian sebelumnya terikait pengaruh faktor-faktor tersebut masih menunjukkan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Di Provinsi Riau?
2. Apakah Pemahaman Regulasi berpengaruh terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Di Provinsi Riau?
3. Apakah Komitmen Organisasi memoderasi hubungan Pelaksanaan anggaran terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Di Provinsi Riau?
4. Apakah Komitmen Organisasi memoderasi hubungan Pemahaman Regulasi terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Di Provinsi Riau?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran pemerintah daerah pada OPD Provinsi Riau.
2. Mengetahui Pemahaman Regulasi berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran pemerintah daerah pada OPD Provinsi Riau.
3. Mengetahui Komitmen Organisasi apakah mampu memoderasi pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap keterlambatan penyerapan anggaran pemerintah

- daerah pada OPD Provinsi Riau
4. Mengetahui Komitmen Organisasi apakah mampu memoderasi pengaruh Pemahaman Regulasi terhadap keterlambatan penyerapan anggaran pemerintah daerah pada OPD Provinsi Riau.

Tinjauan Teori

Stewardship Theory

Menurut (Donaldson and Davis, 1991) *Stewardship Theory* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi terhadap tujuan untuk individu tetapi lebih mengutamakan tujuan utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengamsumsi bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan Organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya, pemerintah pusat tidak dapat melakukannya dengan sendiri dikarenakan pemerintah pusat tidak mempunyai dana yang cukup untuk penyediaan sumber daya, maka dari itu pemerintah pusat sangat berharap kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya tersebut, karena adanya keterbatasan dana maka di perlukan pembuatan anggaran. Penyusunan anggaran merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan untuk memaksimalkan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah (Mulyani and Wibowo, 2017).

Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider (1985), pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif perilaku seseorang (Gibson, 1994 dalam Robbins dan Judge,

2008). Teori ini menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi menjelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Teori atribusi telah diusulkan untuk mengembangkan penjelasan tentang bagaimana kita menilai individu secara berbeda, berdasarkan makna yang kita berikan pada perilaku tertentu. Pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa ketika kita mengamati perilaku seseorang, kita berusaha untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara intrinsik adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kontrol pribadi seseorang. Di sisi lain perilaku yang diinduksi secara eksternal dianggap sebagai akibat dari penyebab eksternal, di mana individu telah dipaksa oleh situasi untuk berperilaku seperti itu (Muthoharoh, 2021).

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran.

Pelaksanaan anggaran merupakan implementasi perencanaan anggaran yang telah di susun. Adapun yang terpenting dalam pelaksanaan anggaran adalah proses pelaksanaan anggaran itu sendiri. Sistem informasi akuntansi dan manajemen yang dipakai akan mempengaruhi proses pelaksanaan anggaran tersebut. Anggaran kas disusun setiap bulannya guna memudahkan dan mengendalikan target penyerapan anggaran setiap triwulan yang harus dicapai. Semakin baik tingkat pelaksanaan anggaran akan meningkatkan jumlah serapan anggaran belanja OPD. Proses pelaksanaan anggaran merupakan

proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah 29 ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi (Muhammad Gustavo Puluala 2020)

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2004[9], tahun anggaran pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah adalah tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dapat dikatakan bahwa, jika pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka penyerapan anggarannya juga semakin baik. Harahap et.al (2020)

Dapat disimpulkan semakin baik pelaksanaan anggaran oleh OPD akan berpengaruh pada tingginya tingkat Keterlambatan Penyerapan Anggaran belanja. Hal ini sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Aprialdy Husen (2022), Harahap et.al (2020) menemukan bahwa Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Rahardjo, 2011) menemukan bahwa Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Pelaksanaan Anggaran Berpengaruh Positif terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran

Pengaruh Pemahaman Regulasi Terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran

Secara teori menurut (Bastian, 2010) dapat dijelaskan bahwa pemahaman regulasi adalah pengetahuan tentang peraturan yang telah disahkan dan ketentuan yang harus dijalankan dan

dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang mana pemerintah daerah sebagai *stakeholder* yang pengaruhnya cukup signifikan terhadap pembangunan di daerah oleh karena itu pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi untuk mengendalikan kegiatan pada pemerintahan. Sehingga segala tindakan pengguna anggaran pada OPD dalam proses penyerapan anggaran disebabkan kebijakan atau aturan dalam pengelolaan anggaran yang sudah berjalan dan terlaksana dengan baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alimuddin (2018) menemukan regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, kesimpulan yang diperoleh mengindikasikan bahwa kejelasan regulasi mulai dari tahap perencanaan hingga SOP berhubungan signifikan dengan penyerapan anggaran. Selain itu hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridani (2015) dan Widianingrum (2017) yang juga membuktikan bahwa faktor regulasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rifai (2016) yang membuktikan sebaliknya bahwa Pemahaman Regulasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD Pemprov NTB.

Dapat disimpulkan Semakin tinggi tingkat kepatuhan dan pemahaman terhadap regulasi akan meningkatkan Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja. Hal ini sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabatiwi, (2020), Ramadhani & Setiawan (2019), Setiawan Hanggara (2022) menemukan bahwa Pemahaman Regulasi berpengaruh terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran. Handayani (2017) menemukan bahwa Pemahaman Regulasi berpengaruh terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Pemahaman Regulasi Berpengaruh
Positif terhadap Keterlambatan
Penyerapan Anggaran

**Pengaruh Pelaksanaan Anggaran
Terhadap Keterlambatan Penyerapan
Anggaran dengan Dimoderasi oleh
komitmen organisasi**

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan dan penerimaan tentang kerja terhadap tujuan organisasi tersebut. Komitmen organisasi dikarakteristikan sebagai menerima tujuan dan nilai organisasi serta melakukan berbagai usaha untuk kepentingan organisasi, dan membuktikan bahwa komitmen organisasi mampu memperkuat pelaksanaan anggaran terhadap Keterlambatan penyerapan anggaran. Hal ini dapat dibuktikan bahwa komitmen organisasi dapat meningkatkan pelaksanaan anggaran pada ketepatan waktu pelaksanaan anggaran dan dengan adanya komitmen organisasi tentu dapat menambahkan ketepatan dalam melaksanakan penyerapan anggaran, dengan adanya komitmen organisasi menunjukan jika komitmen mampu memperkuat pelaksanaan anggaran, maka akan mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran. Pelaksanaan Anggaran adalah tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Pelaksanaan Anggaran dilakukan oleh Kepala SKPD dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPASKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Hasil penelitian menunjukan di dukung oleh penelitian Malahayati, (2015). Hasilnya menunjukkan komitmen organisasi mampu memperkuat pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. Hal ini sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabatiwi, (2020), Ramadhani & Setiawan (2019), Sanjaya Tissa (2014) menemukan bahwa Politik Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Komitmen Organisasi Memoderasi
Pengaruh Pelaksanaan Anggaran
Terhadap Keterlambatan Penyerapan
Anggaran

**Pemahaman Regulasi Anggaran
Terhadap Keterlambatan Penyerapan
Anggaran dengan Dimoderasi oleh
Komitmen Organisasi**

Dalam penelitian Handayani (2017) menyatakan bahwa pemahaman mengenai regulasi di bidang keuangan daerah termasuk salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat serapan anggaran belanja dengan didukungnya berkomitmen dalam berorganisasi. Pemahaman Regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada dan berkomitmen.

Pemahaman Regulasi diartikan pengetahuan mengenai peraturan yang telah dibuat, dan sebagai kaidah yang dibuat untuk mengatur petunjuk yang dipakai untuk membuat sesuatu hal lebih terorganisir serta mengandung ketentuan yang harus dipatuhi dengan adanya berkomitmen dalam berorganisasi (Bastian, 2018). Dalam mengimplementasikan kebijakan dan menghadapi permasalahan, setiap organisasi memerlukan Pemahaman regulasi. Dengan adanya Komitmen Organisasi tentu dapat meningkatkan tingkat kepengaruhan antara pemahaman regulasi terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran, oleh karena itu dengan dibantunya Komitmen Organisasi maka dalam memahami Pemahaman Regulasi yang berlaku tentu akan lebih mudah lagi, dengan demikian maka Komitmen Organisasi akan mendorong meningkatnya Pemahaman Regulasi terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran

Hasil penelitian Ramadhani dan Setiawan (2019) menyatakan bahwa Pemahaman Regulasi yang didukung Komitmen Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran dan didukung oleh Uluala (2020), menyatakan bahwa Pemahaman Regulasi yang didukung Komitmen Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Komitmen Organisasi memoderasi pengaruh Pemahaman Regulasi terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Di provinsi Riau memiliki Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 28. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampel sampling jenuh yang terdapat di *Non-Probability Sampling*. Adapun kriteria responden yang telah ditentukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas/ Badan/ RSUD
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan,
3. Kepala sub Bagian Keuangan,
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Dari data responden diatas, maka peneliti akan menyebarkan 5 kuesioner kepada masing-masing OPD Provinsi Riau . Sehingga total kuesioner yang akan disebarkan adalah 150 Kuesioner.

Defenisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterlambatan penyerapan anggaran.

Variabel Independen (X)

Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari pelaksanaan anggaran (X1) dan Regulasi(X2).

Variabel Moderasi (Z)

Variabel Moderating yaitu variabel yang memperkuat / memperlemah hubungan variabel dependen dan variabel independen. Variabel moderating dalam penelitian ini adalah : Komitmen Organisasi (Z)

Tabel 1 Matriks Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Keterlambatan Penyerapan Anggaran (Y)	Keterlambatan Penyerapan anggaran adalah keterlambatan pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai Selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran).(Alimudin, 2018)	1. Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran. 2. Realisasi pertriwulan 3. Konsistensi dalam pelaksanaan program/kegiatan 4. Ketepatan waktu jadwal penyerapan anggaran (Alimudin, 2018)	Likert
2.	Pelaksanaan Anggaran (X1)	Pelaksanaan merupakan aktivitas usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (Ramdhani & Anisa, 2017).	1. Budaya Kerja 2. Penyelesaian administrasi 3. Jumlah pejabat pengadaan B&J 4. Proses pemeriksaan SPJ 5. Jadwal Anggaran kas (Ramdhani & Anisa, 2017)	Likert
3.	Pemahaman Regulasi (X2)	Pemahaman Regulasi adalah Pemahaman mengenai peraturan peraturan yang sudah di buat dan ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan, maupun organisasi sosial lainnya. dwiyana (2017).	1. Pagu anggaran 2. Realisasi anggaran dwiyanana (2017)	Likert
4.	Komitmen organisasi (Z)	Komitmen organisasi memiliki arti lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan pegawai untuk memberikan kontribusi yang besarpada organisasi nya (Nursela,etal., 2022).	1. Identifikasi dengan organisasi 2. Keterlibatan 3. Loyalitas (Nursela et al., 2022))	Likert

Sumber: Data olahan, 2024

Metode analisis data

Metode analisis data dalam peneltiaan

ini adalah menggunakan bantuan program komputer Statistical Product and Service Solution 26. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, pengujian kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastitas, uji multikolinieritas, dan uji auto korelasi, analisis regresi berganda, analisis regresi moderasi, serta pengujian hipotesis yang terdiri dari uji parsial (uji T) dan uji koefisien determinasi (R^2).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner secara langsung. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh para peneliti dengan menyajikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden, secara langsung menyertai jawaban (Wati, 2021). Pengumpulan data berupa kuesioner dilakukan peneliti dengan mengirimkan kuesioner secara langsung kepada instansi pemerintah Provinsi Riau.

Dalam penelitian ini, pengukuran yang digunakan menggunakan skala *Likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2017). Respon setiap item dari alat menggunakan skala *Likert* memiliki hierarki positif (Wulandari, 2019). Ada lima item berbobot dalam skala *Likert*, yaitu:

Tabel 2 Skala Model Likert

Skala	Keterangan	Pertanyaan Positif
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Cukup Setuju (CS)	3

4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono, 2017

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 3 Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviation
(Y) Keterlambatan Penyerapan Anggaran	150	22	24	23.60	.591
(X1) Pelaksanaan Anggaran	150	32	44	39.29	2.842
(X2) Pemahaman Regulasi	150	15	23	18.06	1.648
(Z) Komitmen Organisasi	150	20	40	33.91	3.544
Valid N (listwise)	150				

Sumber: Data Olahan SPSS 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel Keterlambatan Penyerapan Anggaran memiliki jumlah data (N) 150 dengan nilai minimum 22,00 dan nilai maksimum 24,00 sedangkan nilai rata-rata (mean) 23.60, maka jumlah standar devisiasinya adalah 0.591. Variabel Pelaksanaan Anggaran dengan jumlah data (N) 150 dengan nilai minimum 32,00 dan nilai maksimumnya 44,00 dengan nilai rata-rata 39.29, maka diperoleh standar devisiasinya adalah 2.842. Variabel Pemahaman Regulasi memiliki jumlah data (N) 150 dengan nilai minimum 15,00 dan nilai maksimum 23,00 sedangkan nilai rata-rata (mean) 18.06, maka jumlah standar devisiasinya adalah 1.648. Variabel Komitmen Organisasi memiliki jumlah data (N) 150 dengan nilai minimum 20,00 dan nilai maksimum 40,00 sedangkan nilai rata-rata (mean) 33.91, maka jumlah standar devisiasinya adalah 3.544.

Hasil Pengujian Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Pertanyaan	R hitung		R tabel	Kesimpulan
Keterlambatan Penyerapan Anggaran (Y)	Penyerapan anggaran 1	0,326	>	0,1593	Valid
	Penyerapan anggaran 2	0,461	>	0,1593	Valid
	Penyerapan anggaran 3	0,382	>	0,1593	Valid
	Penyerapan anggaran 4	0,354	>	0,1593	Valid
	Penyerapan anggaran 5	0,351	>	0,1593	Valid
Pelaksanaan Anggaran (X1)	Pelaksanaan anggaran 1	0,221	>	0,1593	Valid
	Pelaksanaan anggaran 2	0,519	>	0,1593	Valid
	Pelaksanaan anggaran 3	0,643	>	0,1593	Valid
	Pelaksanaan anggaran 4	0,758	>	0,1593	Valid
	Pelaksanaan anggaran 5	0,654	>	0,1593	Valid
	Pelaksanaan anggaran 6	0,555	>	0,1593	Valid
	Pelaksanaan anggaran 7	0,338	>	0,1593	Valid
	Pelaksanaan anggaran 8	0,211	>	0,1593	Valid
	Pelaksanaan anggaran 9	0,221	>	0,1593	Valid
Pemahaman Regulasi (X2)	Pemahaman Regulasi 1	0,616	>	0,1593	Valid
	Pemahaman Regulasi 2	0,707	>	0,1593	Valid
	Pemahaman Regulasi 3	0,689	>	0,1593	Valid
	Pemahaman Regulasi 4	0,600	>	0,1593	Valid
Komitmen Organisasi (Z)	Komitmen Organisasi 1	0,607	>	0,1593	Valid
	Komitmen Organisasi 2	0,543	>	0,1593	Valid
	Komitmen Organisasi 3	0,714	>	0,1593	Valid
	Komitmen Organisasi 4	0,764	>	0,1593	Valid
	Komitmen Organisasi 5	0,703	>	0,1593	Valid
	Komitmen Organisasi 6	0,795	>	0,1593	Valid
	Komitmen Organisasi 7	0,643	>	0,1593	Valid
	Komitmen Organisasi 8	0,732	>	0,1593	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS 2024

Berdasarkan dari tabel diatas, diketahui semua pernyataan yang digunakan dalam kuesioner adalah valid, karena semua nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Sehingga tidak ada item yang dihapus dan semua item pertanyaan dapat digunakan pada keseluruhan model pengujian.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

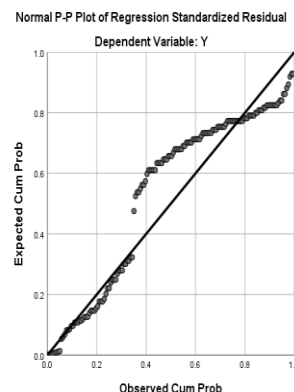
VARIABEL	Cronbach's Alpha	KESIMPULAN
Keterlambatan Penyerapan Anggaran (Y)	0.896> 0,60	Reliable
Perencanaan anggaran	0.666> 0,60	Reliable
Pelaksanaan anggaran	0.652> 0,60	Reliable
Kualitas SDM	0.837> 0,60	Reliable

Sumber: Data Olahan SPSS 2024

Hasil pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai *Cronbach Alpha* diatas 0,60 jadi dapat dikatakan semua konsep pengukuran pada masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel sehingga selanjutnya untuk item-item pada masing-masing konsep variabel layak digunakan sebagai alat ukur.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Olahan SPSS 2024

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas Data Grafik

Berdasarkan grafik pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut normal. Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai sig > 0,05 maka data berdistribusi normal tetapi jika nilai sig < 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi data normal atau tidak normal.

Tabel 6 Uji One Sample Kolomogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^a , _b	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.56203899
Most Extreme Differences	Absolute	0.96
	Positive	0.56
	Negative	-0.96
Test Statistic		0.96
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 ^c

Sumber: Data Olahan SPSS 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai uji *one sampel kolmogorov smirnow* terdistribusikan normal karena mempunyai nilai signifikasi diatas dari 0,05 yaitu 0,200, dengan jumlah data sebanyak 150.

Hasil Uji Multikolinearitas

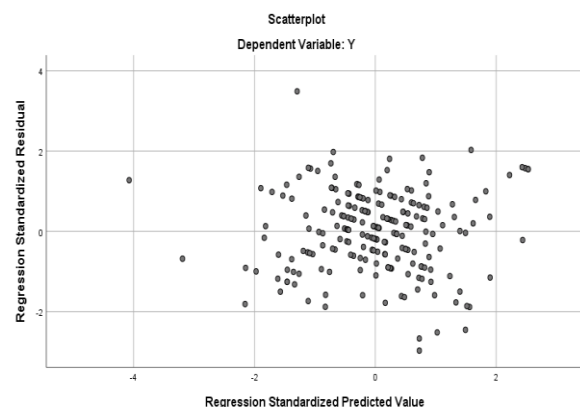
Tabel 7 Hasil Uji Multikolinieritas Data

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pelaksanaan Anggaran	0.995	1.005
Pemahaman Regulasi	0.995	1.005

Sumber: Data Olahan SPSS 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai tolerance keempat variabel lebih dari 0,10 sementara nilai VIF kurang dari 10, maka dikatakan data tersebut tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas, sehingga memenuhi untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Olahan SPSS 2024

Gambar 2 Scatterplot

Dari grafik di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar diatas dan dibawah angka nol. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 8 Uji Analisis Regresi Linier Berganda Model I

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	23.813	.849		.000
	Pelaksanaan Anggaran	.035	.016	.169	.034
	Komitmen Organisasi	.088	.028	.246	.002

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan SPSS 2024

$$Y = 23.813 + 0.035X_1 - 0.088X_2$$

- Nilai konstanta sebesar 23.813 menunjukkan bahwa jika semua variabel bebas diasumsikan nol Penyerapan Anggaran sebesar 23.813.
- Nilai koefisien Pelaksanaan Anggaran (β_1) sebesar 0.035. Hal ini menunjukkan bahwa setiap

kenaikan satu satuan Pelaksanaan Anggaran maka Keterlambatan Penyerapan Anggaran akan mengalami peningkatan sebesar 0.035 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.

Nilai koefisien Pemahaman Regulasi (β_2) sebesar 0.088. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Pemahaman Regulasi maka Keterlambatan Penyerapan Anggaran akan mengalami penurunan sebesar -0.088 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.

Hasil Analisis Regresi Moderasi

Model Regresi Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pelaksanaan Anggaran Terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran

Tabel 9 Analisis Regresi Moderasi Model II

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.955	6.534		2.748	.007
	Pelaksanaan Anggaran	.141	.166	.678	.849	.397
	Komitmen Organisasi	.121	.192	.726	.632	.528
	X1.Z	-.003	.005	-.816	-.616	.539
a. Dependent Variable: Y						

Sumber: Data Olahan SPSS 2024

Berdasarkan Tabel pengujian regresi tersebut, dapat dilihat bahwa output persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = (12.955) + (0.141) X_1 + (0.121) Z + (-0.003) X_1Z + e$$

Berdasarkan table diatas yang menguji peran moderasi Komitmen Organisasi yang dikali dengan Pelaksanaan Anggaran terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran diperoleh koefisien regresi variabel moderasi sebesar -0,003, dengan

nilai sig sebesar $0,539 > 0,05$. Maka variabel Komitmen Organisasi (Z) tidak berhasil memoderasi hubungan antara Pelaksanaan Anggaran (X1) terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran (Y).

Model Regresi Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pemahaman Regulasi Terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran

Tabel 10 Analisis Regresi Moderasi Model III

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30.953	4.732		6.541	.000
	Pelaksanaan Anggaran	-.423	.262	-1.179	-1.614	.109
	Komitmen Organisasi	-.168	.141	-1.010	-1.195	.234
	X1.Z	.010	.008	1.519	1.257	.211
a. Dependent Variable: Y						

Sumber: Data Olahan SPSS 2024

Berdasarkan tabel pengujian regresi tersebut, dapat dilihat bahwa output persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = (30.953) + (-0.423) X_1 + (-0.168) Z + 0.010 X_2Z + e$$

Berdasarkan table diatas yang menguji peran moderasi Pemanfaatan Teknologi yang dikali dengan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Dana Desa diperoleh koefisien regresi variabel moderasi sebesar 0.010, dengan nilai sig sebesar $0,211 > 0,05$. Maka variabel Komitmen Organisasi (Z) tidak berhasil memoderasi hubungan antara Pemahaman Regulasi (X2) terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran (Y).

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji Signifikan Parsial

Tabel 11 Uji t

Model	T table	T	Sig	Keterangan
Pelaksanaan anggaran	1,6554	2.146	0.034	Diterima
Pemahaman Regulasi	1,6554	3.125	0.002	Diterima

Sumber: Data Olahan SPSS 2024

Dari hasil output pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai t hitung Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada tabel diatas serta pada tabel 5.11 yaitu sebesar 2.146 lebih besar dari nilai t tabel ($2.146 > 1,6554$) dengan nilai signifikannya sebesar 0.034 lebih kecil dari 0,05 atau ($0.034 > 0,05$) maka variabel bebas (independen) Pelaksanaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependen). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa **hipotesis pertama**, yaitu “pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran” diterima.
2. Nilai t hitung Pemahaman Regulasi dapat dilihat pada tabel diatas serta pada tabel 5.11 yaitu sebesar 3.125 lebih besar dari nilai t tabel ($3.125 > 1,6554$) dengan nilai signifikannya sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 atau ($0,002 < 0,05$) maka variabel bebas (independen) Pemahaman Regulasi berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependen). **maka hipotesis kedua diterima**. Hal ini berarti pemahaman regulasi berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 12 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.194 ^a	0.038	0.018	0.585
a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber: Data Olahan SPSS 2024

Dari tabel *model summary* di atas, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi

(Adjusted R Square) sebesar 0,018 sama artinya dengan 1,8% variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sisanya 98,2% dipengaruhi variabel luar model penelitian atau dengan kata lain variabel Pelaksanaan Anggaran dan Pemahaman Regulasi memberikan pengaruh terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran adalah sebesar 1,8% sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Keterlambatan Penyerapan anggaran.

Berdasarkan hasil uji regresi, diperoleh nilai t tabel $1,6554 < t$ hitung 2.146 dan nilai signifikan sebesar 0.034 ($p < 0,050$) yang berarti ada pengaruh variabel pelaksanaan anggaran (X1) terhadap keterlambatan penyerapan anggaran (Y). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis pertama, yaitu “pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran” diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian M. Aprialdy Husen (2022), bahwa pelaksanaan anggaran mempengaruhi tingkat penyerapan dengan nilai signifikan (p value) 0,024 yaitu dibawah nilai alpha (α) 0,05 sehingga pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan nilai koefisien regresi pelaksanaan anggaran sebesar 0,185 menunjukkan jika pelaksanaan anggaran semakin baik, maka semakin baik pula penyerapan anggaran.

Dapat disimpulkan semakin baik pelaksanaan anggaran oleh OPD akan berpengaruh pada tingginya tingkat Keterlambatan Penyerapan Anggaran belanja. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Aprialdy Husen (2022), Harahap et.al (2020) menemukan bahwa Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Rahardjo,

2011) menemukan bahwa Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran.

Pengaruh Pemahaman Regulasi Terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran.

Hipotesis kedua (H2) yang diajukan oleh penelitian ini adalah pemahaman regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kualitas SDM memiliki t hitung $> t$ tabel yaitu t hitung sebesar 3.125 sementara t tabel sebesar 1,6554 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis kedua diterima. Hal ini berarti pemahaman regulasi berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

Dapat disimpulkan Semakin tinggi tingkat kepatuhan dan pemahaman terhadap regulasi akan meningkatkan Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja. Hal ini sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabatiwi, (2020), Ramadhani & Setiawan (2019), Setiawan Hanggara (2022) menemukan bahwa Pemahaman Regulasi berpengaruh terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran. Handayani (2017) menemukan bahwa Pemahaman Regulasi berpengaruh terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran.

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Keterlambatan Penyerapan anggaran di Moderasi Komitmen Organisasi.

Hipotesis yang ketiga (H3) diajukan oleh penelitian ini menyatakan keterkaitan antara Pelaksanaan Anggaran Terhadap Keterlambatan Penyerapan anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel moderasi, berdasarkan uji t pada tabel 5.10 menyatakan bahwa nilai Komitmen Organisasi sebagai variabel moderasi hubungan antara Pelaksanaan Anggaran Terhadap Keterlambatan Penyerapan anggaran memiliki nilai t hitung $-0,616 < t$ tabel 1,6654 dengan nilai

signifikannya 0,539 atau nilai signifikannya adalah $> 0,05$ maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak artinya Komitmen Organisasi tidak berhasil memoderasi hubungan antara Pelaksanaan Anggaran Terhadap Keterlambatan Penyerapan anggaran.

Dapat disimpulkan Semakin tinggi komitmen organisasi tidak dapat memperkuat hubungan pelaksanaan anggaran terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja. Hal ini sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Orie Marsontio¹, Yesi Mutia Basri² (2022) dan Nurchayati, (2022) menemukan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pelaksanaan organisasi terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran.

Pengaruh Pemahaman Regulasi Terhadap Keterlambatan Penyerapan anggaran di Moderasi Komitmen Organisasi.

Hipotesis yang keempat (H4) diajukan oleh penelitian ini menyatakan keterkaitan antara Pemahaman Regulasi Terhadap Keterlambatan Penyerapan anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel moderasi, berdasarkan uji t pada tabel 5.10 menyatakan bahwa nilai Komitmen Organisasi sebagai variabel moderasi hubungan antara Pemahaman Regulasi Terhadap Keterlambatan Penyerapan anggaran memiliki nilai t hitung $1,257 < t$ tabel 1,6554 dengan nilai signifikannya 0,211 atau nilai signifikannya adalah $> 0,05$ maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak artinya Komitmen Organisasi tidak berhasil memoderasi hubungan antara Pemahaman Regulasi Terhadap Keterlambatan Penyerapan anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Alimuddin (2018) yang menemukan regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, kesimpulan yang diperoleh mengindikasikan bahwa kejelasan regulasi mulai dari tahap

perencanaan hingga SOP berhubungan signifikan dengan penyerapan anggaran. Selain itu hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini juga di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridani (2015) dan Widianingrum (2017) yang juga membuktikan bahwa faktor regulasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rifai (2016) yang membuktikan sebaliknya bahwa Pemahaman Regulasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sejalan dengan penelitian ini bahwasanya pelaksanaan anggaran pada OPD Provinsi Riau mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran dengan nilai signifikan (p value) 0,211 yaitu dibawah nilai alpha (α) 0,05 sehingga Komitmen Organisasi tidak mampu memoderasi pemahaman organisasi terhadap keterlambatan penyerapan anggaran sehingga dapat disimpulkan Semakin tinggi komitmen organisasi tidak dapat memperkuat hubungan pemahaman regulasi terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sesuai dengan perumusan masalah dan hipotesis maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pelaksanaan anggaran, dan pemahaman regulasi terhadap penyerapan anggaran dimoderasi komitmen organisasi di OPD Lingkungan Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pengujian dari jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang dibagikan kepada 150 responden dari 30 OPD di Pemerintah Provinsi Riau, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil uji regresi, diperoleh nilai t tabel $1,6554 < t$ hitung $2,146$ dan nilai signifikan sebesar 0.034 ($p < 0,050$) hasil analisis menunjukkan bahwa

pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran pemerintah daerah.

2. Berdasarkan hasil uji regresi, diperoleh nilai t tabel $1,6554 < t$ hitung $3,125$ dan nilai signifikan sebesar 0.002 ($p < 0,050$) hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman regulasi berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.
3. Berdasarkan hasil uji regresi, diperoleh nilai t tabel $1,6554 < t$ hitung $-,616$ dan nilai signifikan sebesar 0.539 ($p < 0,050$) hasil analisis menunjukkan bahwa Komitmen organisasi tidak berhasil memoderasi hubungan antara pelaksanaan anggaran terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

Berdasarkan hasil uji regresi, diperoleh nilai t tabel $1,6554 < t$ hitung $1,257$ dan nilai signifikan sebesar 0.211 ($p < 0,050$) hasil analisis menunjukkan bahwa Komitmen organisasi tidak berhasil memoderasi hubungan antara pemahaman regulasi terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperkaya instrumen penelitian yang digunakan (selain kuesioner) seperti wawancara responden sehingga dapat memperoleh penjelasan yang lebih detail terkait fenomena pada pemerintahan yang ada dan memperluas jangkauan penelitian.
2. Penelitian ini mengharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain yang diidentifikasi dapat mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran Seperti variabel pengawasan internal, partisipasi, motivasi, dan variabel lainnya .
3. Bagi para peneliti selanjutnya dapat lebih memperluas objek penelitian dengan menambahkan beberapa provinsi

lain, sehingga penelitian juga menggambarkan hasil yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim,Dkk (2014). Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Yogyakarta2014
- Tjahyo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, Pt Mizan Republika, Jakarta,2015
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta 2010
- Dewi, N. L. P. L., Dwirandra, A. A. N. B., & Wirakusuma, M. G. (2017). Kemampuan Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sdm Pada Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 6.4Issn:2337-3067, 4(6), 1609–1638.
- Harahap, S. A. S., Taufik., T., & Nurazlina. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran , Pelaksanaan Anggaran , Pencatatan Administrasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris Pada Opd Kota Dumai). *Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(1), 1–10.
- Imansari, R. V. D. (2020). *Pengaruh Kualitas Dipa, Akurasi Perencanaan Kas, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah*.
- Ksuma, S. R. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi SumberDaya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran [Ada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara. *Jurnal*

Ilmiah Universitas Sumatera Utara, 1–66.

- Lelly Ani, Mulyadi, J., & Pratowo3, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Dengan Perencanaan Anggaran Sebagai Pemoderasi Pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2013-2017. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 5(1), 1689–1699.
- Putri, Kadek M. R., Yuniarta, G. A., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran (Survei Pada Skpd Di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran. *Jurnal Riser Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134–148.
- Saprudin, S. (2018). Pengaruh Dokumen Perencanaan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umumkabupaten Bone Bolango. *Gorontalo Accounting Journal*, 1(2), 44– 52. <https://doi.org/10.32662/Gaj.V1i2.388>
- Yumiati, F., Islahuddin, & Nadirsyah. (2016). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Serapan Anggaran Skpa Di Pemerintah Aceh. *Akuntansi*, 5(4), 43–49.
- Sugiyono, (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung:Alfabeta

Koriatmaja, Hidayat, S, (2020). Thr Effect Of Budget, Budget Execution, Procurement Good/Service And Human Resources On Absortion Budget(Study At Opd In Central Lombok Regency West Nusa Tenggara Province, Indonesia) Global Journal Of Management And Bussines Reasearch Vol20. 2020

Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi.

[https://Sumatratimes.Co.Id/2020/10/09/Da-ya-Serap-Apbd-Sejumlah-Opd-Masih-Rendah Pjs-Bupati-Rohil-Pimpin-Evaluasi-Realisasi-Anggara](https://Sumatratimes.Co.Id/2020/10/09/Da-ya-Serap-Apbd-Sejumlah-Opd-Masih-Rendah-Pjs-Bupati-Rohil-Pimpin-Evaluasi-Realisasi-Anggara)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Issue 655).

Ananda, S.P., Maria, M. and Sari, Y. (2022) ‘Pengaruh Perencanaan Penganggaran dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Penyerapan Anggaran’, 1(2), pp. 68–74.

Ghozali, I. (2018) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Lestari, L. and Yuliani, N.L. (2022) ‘Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa Dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja’, pp. 648–663.

Muthoharoh, A.A. (2021) *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja, Administrasi Bisnis*. UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH
MAGELANG.

Nurchayati, S.N. (2022) ‘Kata Kunci’., 9(3), pp. 1285–1305.

Orie Marsontio¹, Yesi Mutia Basri^{2*}, V.R. (2022) ‘Jurnal Akuntansi & Ekonomika’, 12(1). Available at: <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3505>.

Wandari, R.S. and Nugraha, D.S. (2021) ‘Pengaruh Perencanaan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Survei pada SKPD di Wilayah Pemerintah Kota Cimahi) The Effect Of Planning and Human Resource Competence on the Budget Absorption (Survey on the Regional Gove’, 1(3), pp. 551–563.